

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2023



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2023

ISBN: 978-602-1059-65-4

No. Publikasi: 52000.23060

Katalog BPS: 7102025.52

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman: xvi + 38 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Desain Sampul:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2023

Pengarah : Drs. Wahyudin, M.M.
Penanggung Jawab : Drs. Muhamad Saphoan
Editor : Sri Endah Wardanti, S.S.T., M.M.
Penulis : Desak Nyoman Febrina A. P
dan Lalu Riza Singrapati
Pengolah Data : Desak Nyoman Febrina A. P
dan Lalu Riza Singrapati
Desain Kover : Dinda Saskia Rahma Dewi
Tata Letak : Dinda Saskia Rahma Dewi

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://lib.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Publikasi **“Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023”** merupakan publikasi perdana yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berisi tentang data Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kemahalan harga barang dan jasa konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan. Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan atau konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.

Data IKK merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) di samping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan data IKK di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018–2022.

Dalam penyusunan publikasi ini tidak tertutup kemungkinan masih terdapat kelemahan atau kekurangan. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Mataram, Desember 2023
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala,



Wahyudin

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.kms.go.id>



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xv
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Cakupan	2
KONSEP DAN DEFINISI	3
METODOLOGI	7
3.1 Indeks Kemahalan Konstruksi	7
3.2 Paket Komoditas IKK	8
3.3 Diagram Timbang IKK	10
3.4 Dana Alokasi Umum (DAU)	10
3.5 Formula Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	11
3.6 IKK 2023	13
ULASAN SINGKAT	15
4.1 Gambaran Umum Provinsi NTB	15
4.2 Dana Alokasi Umum Provinsi NTB	21
4.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi NTB	22
4.4 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota	24
DAFTAR PUSTAKA	28

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://lib.bps.go.id>



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Hal
1	Jarak Ibukota Kabupaten Kota ke Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (Km), 2022	18
2	Panjang Jalan Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Km), 2022	19
3	Panjang Jalan Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Km), 2022	20
4	Rencana Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2022	21
5	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023	24

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.bps.go.id>



DAFTAR GRAFIK



No	Judul Grafik	Hal
1	Luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2023	16
2	Ketinggian Ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (mdpl), 2023	17
3	Peringkat Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Level Nasional, 2019-2023	23
4	Indeks Kemahalan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023	26

<https://ntb.bps.go.id>

Halaman ini Sengaja Dikosongkan



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Hal
1	Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2023	22
2	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023	25

<https://htb.bps.go.id>

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://htb.bps.go.id>



DAFTAR LAMPIRAN



No	Judul Lampiran	Hal
1	Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2019 (Kota Semarang = 100)	32
2	Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2020 (Kota Semarang = 100)	33
3	Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2021 (Kota Makassar = 100)	34
4	Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2022 (Kota Makassar = 100)	35
5	Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2023 (Kota Makassar = 100)	36
6	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019 (Kota Semarang = 100)	37
7	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020 (Kota Semarang = 100)	38
8	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021 (Kota Makassar = 100)	39
9	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022 (Kota Makassar = 100)	40
10	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023 (Kota Makassar = 100)	41

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.bps.go.id>



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak diundangkannya kebijakan otonomi daerah (Otonomi Daerah) pada tahun 2000, pemerintah daerah diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otonomi Daerah adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU diduga memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini dengan harapan pembagian DAU ke daerah menjadi lebih adil, proporsional dan merata. Dalam formulasi DAU, salah satu variabel yang dibutuhkan adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota.

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan IKK sejak tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang. Data IKK tersebut ditujukan untuk melihat tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antarwilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi suatu kota acuan. Menurut *World Bank*, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang relatif beragam dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, infrastruktur diduga memegang peranan dalam penentuan harga konstruksi di Indonesia. Semakin sulit letak geografis suatu daerah maka diduga semakin tinggi pula tingkat harga konstruksi di daerah tersebut.

1.2 TUJUAN

Penyajian Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan informasi terkait data tingkat kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan provinsi lainnya di Indonesia.

1.3 CAKUPAN

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019–2023.



KONSEP DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi.

Harga perdagangan besar (HPB) adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara party/grosir di pasar pertama atas suatu barang.

HPB bahan bangunan/konstruksi adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.

Pedagang besar (PB) adalah pedagang/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara *party/grosir* atau dalam jumlah besar.

Pedagang campuran adalah pedagang yang dapat menjual barang dagangannya dalam jumlah besar maupun eceran. Grosir atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif meng- ingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) didefinisikan sebagai suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antarwilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi suatu kota acuan.

Bahan bangunan atau konstruksi didefinisikan sebagai material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan atau konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.

Kegiatan Konstruksi didefinisikan sebagai suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang tercatat dalam penghitungan IKK hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, serta distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.

Harga sewa alat berat konstruksi didefinisikan sebagai harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini merupakan sewa selama 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki syarat batas umur maksimal 8 tahun.

Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, minggu, atau bulan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah satu unit/hari.

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang. Satuan/unit yang digunakan dalam upah jasa ini adalah satu orang/hari.

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi yang akan dibandingkan antar daerah, yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diukur melalui sekelompok barang dan jasa yang digunakan.

Paket komoditas adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi asas representativeness dan comparability yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota. Paket komoditas disebut juga sebagai kualitas nasional.

Kualitas provinsi adalah kualitas yang dominan disuatu provinsi tetapi tidak dominan bila ditinjau secara nasional. Kualitas provinsi digunakan sebagai dasar konversi kedalam kualitas nasional untuk kualitas nasional yang memang tidak terdapat di provinsi tersebut.

Diagram Timbang atau bobot yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari diagram timbang IKK menurut kelompok jenis bangunan (3 kelompok) dan diagram timbang Umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan adalah bobot setiap jenis barang dan jasa dalam memperoleh nilai TKK masing–masing kelompok jenis bangunan. Diagram timbang umum adalah bobot setiap jenis bangunan dalam memperoleh IKK umum setelah diperoleh IKK masing–masing kelompok jenis bangunan.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.kms.go.id>

3.1 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan harga bahan bangunan atau jasa konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang sama dibandingkan dengan suatu kota acuan. Lebih lanjut, IKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan atau konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan harga input dan yang kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan, digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan overhead cost. Disisi lain, pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Namun, terdapat kelemahan pada pendekatan ini yaitu dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga kurang sesuai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Dengan pertimbangan ini, disepakati penghitungan IKK menggunakan pendekatan harga input.

Dalam penghitungan IKK diperlukan data/komponen penunjang yaitu paket komoditas, diagram timbang, dan data harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK. Selain itu, ditetapkan pula suatu kabupaten/kota sebagai acuan dalam penghitungan indeksnya. Penentuan kota acuan dalam penghitungan IKK dilakukan dengan

menentukan salah satu kabupaten/kota yang memiliki nilai IKK mendekati angka rata-rata seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK diduga untuk memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya. Pada tahun 2013 sampai 2014 digunakan Kota Samarinda sebagai kota acuan. Tahun 2015 hingga 2017 digunakan Kota Surabaya sebagai kota acuan, sedangkan tahun 2018 hingga 2020 digunakan Kota Semarang sebagai kota acuan. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 yang menjadi kota acuan adalah Kota Makassar.

3.2 PAKET KOMODITAS IKK

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Pendekatan ini digunakan dalam *International Comparison Programs* (ICP) tahun 2005. Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Dalam metode BOCC, data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah. Komponen konstruksi merupakan output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap intermediate dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini yaitu semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan dengan tujuan memberikan perbandingan harga konstruksi antar wilayah yang lebih sederhana dan biaya yang murah serta memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ). Mengacu pada pendekatan BOCC, paket komoditas IKK didefinisikan sebagai suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan atau konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan atau konstruksi.

IKK dihitung menurut jenis kelompok barang/komoditas yang terdiri dari 5 (lima) jenis kelompok bangunan. Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang terdiri dari 5 (lima) kelompok jenis bangunan yaitu bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; prasarana pekerjaan umum untuk pertanian;

jalan, jembatan, dan pelabuhan; bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi; serta bangunan lainnya. Berikut klasifikasi dari masing masing jenis bangunan tersebut.

- A. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal:
 - 1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
 - 2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi:
 - 3. konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.
- B. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian:
 - 1. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (reservoir), bendung (weir), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - 2. Bangunan proses tempat hasil pertanian, meliputi:
 - 3. bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
- C. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan:
 - 1. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu rambu lalu lintas.
 - 2. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi:
 - 3. pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 - 4. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- D. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi:
 - 1. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
 - 2. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - 3. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi: pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.

4. Konstruksi sentral telekomuni–kasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
5. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
6. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
7. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
8. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
9. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
10. Bangunan lainnya, meliputi: bangunan sipil, pembangunan lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman.

3.3 DIAGRAM TIMBANG IKK

Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2023 terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang IKK umum. IKK tahun 2023 menggunakan penimbang updating *Bill of Quantity* (BoQ) sampai tahun 2022. BoQ ini dikumpulkan dari masing–masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing–masing.

3.4 DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan

salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU salah satunya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 10 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional yaitu minimal sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto). Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU (DAU = 0).

3.5 FORMULA PENGHITUNGAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)

Penghitungan IKK 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_j = \sum_{k=1}^n p_k q_k$$

Keterangan:

NK_j = Nilai komponen ke-j

p_k = Harga material/upah/sewa alat ke-k

q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

Keterangan:

NK_j = Nilai komponen ke- j

C_i = *Dummy* kabupaten/kota ke- i

P_j = *Dummy* komponen ke- j dalam suatu sistem/bangunan

α_i dan β_j = Koefisien Regresi

$PPP(\text{Purchasing Power Parity})_{\text{Sistem}_j} = \exp(\alpha_i)$

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{\text{bangunan}_i} = \prod_{i=1}^n (PPP_{\text{sistem}_i})^{w_{2i}}$$

Keterangan:

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{\text{proyek}_i} = \prod_{i=1}^n (PPP_{\text{bangunan}_i})^{\frac{1}{n}}$$

Keterangan:

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan,

misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

$$C_i = \text{dummy kota acuan} = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{proyek_i})^{w1i} \right) \cdot 100$$

Keterangan:

n = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

3.6 IKK 2023

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2023 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan *updating* BoQ tahun 2022.

IKK tahun 2023 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2022, Oktober 2022, Januari 2023, dan April 2023. Seperti halnya IKK sebelumnya, IKK tahun 2023 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi. Kota acuan yang digunakan pada tahun 2021-2023 merupakan kota acuan baru yaitu Kota Makassar.

Kota acuan IKK sebelumnya yaitu Kota Semarang untuk IKK 2018–2020, Kota Surabaya untuk IKK 2015–2017 dan Kota Samarinda untuk IKK 2012–2014. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data.

Pada proses penghitungan IKK tahun 2023, dilakukan penyempurnaan sewa alat berat murni berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022. Penghitungan sewa alat berat murni dilakukan dengan cara mengeluarkan biaya mobilitas alat, biaya bahan bakar (solar), biaya pelumas, biaya operator, serta biaya perbaikan dan perawatan dari total biaya sewa alat berat. Penyempurnaan penghitungan sewa alat berat merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas data IKK.

4.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI NTB

4.1.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI NTB

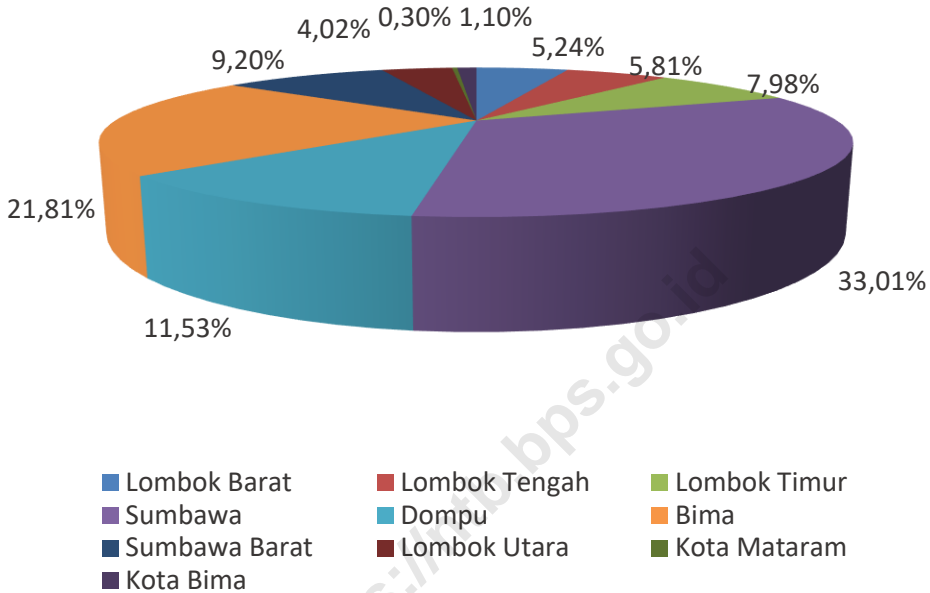
Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil, memiliki luas wilayah 20.124,48 km². Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.426,20 km² (76,49 %) atau 2/3 dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan luas Pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja. Dari 380 pulau yang ada, terdapat 38 pulau yang telah berpenghuni. Secara astronomis, Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara 8⁰10'–9⁰5' Lintang Selatan dan antara 115⁰46'–119⁰05' Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki batas-batas:

- Batas utara dengan Laut Jawa dan Laut Flores;
- Batas selatan dengan Samudera Hindia;
- Batas barat dengan Selat Lombok dan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- Batas timur dengan Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi ke dalam delapan kabupaten dan dua kota meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima. Diantara kesepuluh kabupate/kota tersebut, Kabupaten Sumbawa tercatat memiliki luas wilayah terluas dengan luas wilayah mencapai 6.643,09 km² (33,01 persen), diikuti oleh Bima 4.389,15 km² (21,81 persen), Dompu 2.320,35 km² (11,53 persen), Sumbawa Barat 1.851,45 km² (9,20 persen), Lombok Timur 1.605,93 km² (7,98 persen), Lombok Tengah 1.169,23 km² (5,81 persen), Lombok Barat 1.054,52 km² (5,24 persen), Lombok Utaram 809,00 km² (4,02 persen), Kota Mataram

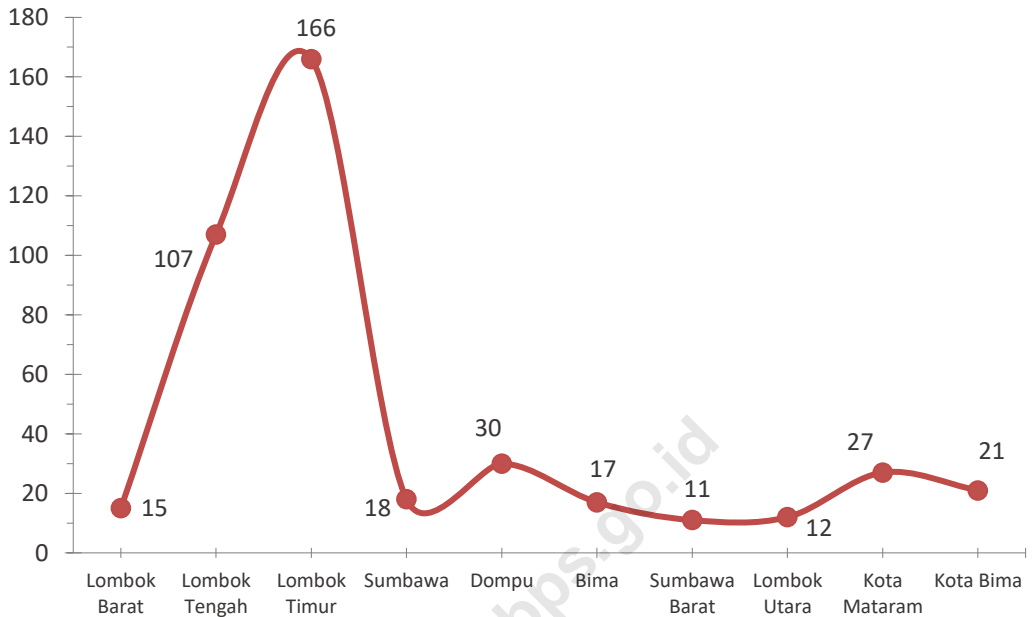
221,37 km² (1,10 persen), dan Kota Bima dengan wilayah terkecil yang hanya 60,37 km² (0,30 persen).

Grafik 1. Luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2023



Berdasarkan relief dan topografi, Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 mdpl sementara Taliwang terendah dengan 11 mdpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.775 mdpl, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 mdpl. Jumlah sungai di Pulau Sumbawa lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sungai di Pulau Lombok. Jumlah sungai di Pulau Lombok hanya 36 buah, sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat 117 sungai.

Grafik 2. Ketinggian Ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (mdpl), 2023



4.1.2 KONDISI TRANSPORTASI

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan diperlukan demi memudahkan proses mobilisasi penduduk antar daerah dan menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, utamanya untuk daerah–daerah sulit terjangkau. Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat yaitu sebagai penghubung antara sentra–sentra produksi dengan daerah pemasaran dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Terkait dengan besaran harga barang dan jasa pada bidang konstruksi, selain ketersediaan barang/jasa (*supply*), kelancaran distribusi barang/jasa (konstruksi) ke suatu wilayah diduga memiliki pengaruh.

Tabel 1. Jarak Ibukota Kabupaten Kota ke Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (Km), 2022

Kabupaten/ Kota	Jarak ke Ibukota Provinsi (Km)
(1)	(5)
Lombok Barat	20,30
Lombok Tengah	27,00
Lombok Timur	52,00
Sumbawa	179,00
Dompu	377,00
Bima	414,00
Sumbawa Barat	111,70
Lombok Utara	50,50
Kota Mataram	0,00
Kota Bima	439,00

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi NTB

Kondisi jalan menjadi salah satu syarat dalam pendistribusian barang ke suatu wilayah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan harga barang/jasa konstruksi tersebut. Panjang jalan di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 mencapai 8.505 km yang terdiri dari jalan negara (934 km), jalan provinsi (1.484 km), dan jalan kabupaten/kota (6.087 km).

Tabel 2. Panjang Jalan Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Km), 2022

Kabupaten/ Kota	Tingkat Kewenangan			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	72	125	572	769
Lombok Tengah	57	143	810	1.010
Lombok Timur	49	189	1.019	1.257
Sumbawa	222	367	952	1.541
Dompu	218	103	535	856
Bima	100	389	832	1.321
Sumbawa Barat	70	76	339	485
Lombok Utara	87	10	400	497
Kota Mataram	42	62	370	474
Kota Bima	17	20	258	295
NTB	934	1.484	6.087	8.505

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB dan Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota Se-Prov NTB

Dilihat dari kondisi permukaannya, jalan dengan kondisi baik tercatat sepanjang 3.398,98 km (55,86 persen), yang tergolong kondisi sedang tercatat sepanjang 647,16 km (10,64 persen), kondisi rusak ringan tercatat sepanjang 1.015,70 km (16,69 persen), dan kondisi rusak berat tercatat sepanjang 1.023,19 km (16,81 persen).

Tabel 3. Panjang Jalan Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Km), 2022

Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan/ <i>condition</i>				Jumlah
	Baik/ <i>Good</i>	Sedang/ <i>Moderate</i>	Rusak Ringan/ <i>Damaged</i>	Rusak Berat/ <i>Seriously Damaged</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Lombok Barat	289,79	120,60	130,26	30,94	571,58
Lombok Tengah	405,27	124,59	238,73	41,29	809,88
Lombok Timur	614,17	74,21	139,19	191,27	1.018,84
Sumbawa	535,58	13,07	7,56	395,30	951,51
Dompu	168,52	127,14	34,02	205,22	534,90
Bima	428,62	33,72	340,35	28,92	831,61
Sumbawa Barat	229,58	17,86	59,59	31,66	338,69
Lombok Utara	228,43	100,27	32,85	38,52	400,07
Kota Mataram	334,03	8,70	14,40	12,72	369,85
Kota Bima	165,00	27,01	18,75	47,35	258,11
NTB	3.398,98	647,16	1.015,70	1.023,19	6.085,03

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB dan Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota Se-Prov NTB

Selain kondisi jalan, pembentukan harga barang/jasa konstruksi juga diduga dipengaruhi oleh jarak menuju setiap kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Akses barang masuk dari luar Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui sebelas pelabuhan yaitu Pelabuhan Lembar, Badas, Pelabuhan Bima, Labuhan Haji, Labuhan Lombok, Calabai, Kempo, Sape, Pemenang, dan Benette. Adapun jumlah bongkar muat barang di seluruh pelabuhan tersebut pada tahun 2022 mencapai 2.275.252 ton. Dengan nilai pada pelabuhan yang diusahakan sebesar 2.213.772 ton dan nilai pada pelabuhan yang tidak diusahakan sebesar 61,480 ton.

4.2 DANA ALOKASI UMUM PROVINSI NTB

Alokasi DAU bagi setiap daerah sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan tiap daerah. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Suatu daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Besaran DAU per Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 4. Rencana Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribu Rupiah), 2022*

Kabupaten/Kota	Alokasi DAU
(1)	(2)
Lombok Barat	717.540.694
Lombok Tengah	939.405.513
Lombok Timur	1.072.534.185
Sumbawa	781.730.762
Dompu	536.573.279
Bima	833.301.560
Sumbawa Barat	371.041.136
Lombok Utara	374.284.147
Kota Mataram	569.742.255
Kota Bima	432.159.814
Provinsi NTB	1.478.509.073

*) Data APBD

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (<https://djk.kemenkeu.go.id/?portfolio=daftar-alokasi-tkdd-2022-prov-nusa-tenggara-barat>)

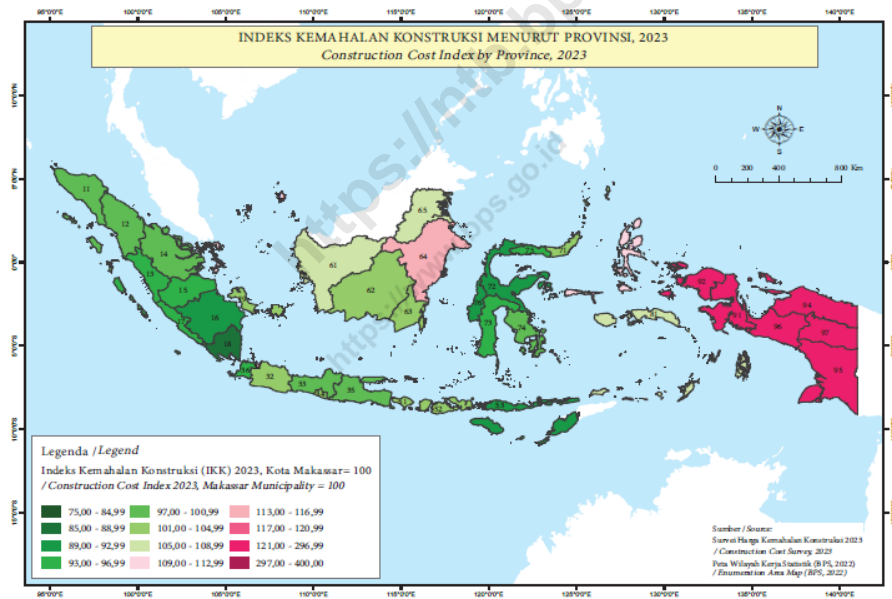
Kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kabupaten Lombok Timur dengan DAU sebesar 1.072,53 miliar rupiah kemudian disusul Kabupaten Lombok Tengah sebesar 939,40 miliar rupiah. Sedangkan kabupaten yang tercatat memperoleh DAU

paling rendah adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan DAU sebesar 371,04 miliar rupiah.

4.3 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI NTB

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang merupakan indeks spasial digunakan untuk membandingkan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dengan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di kota acuan. Semakin besar IKK menunjukkan semakin mahal harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri.

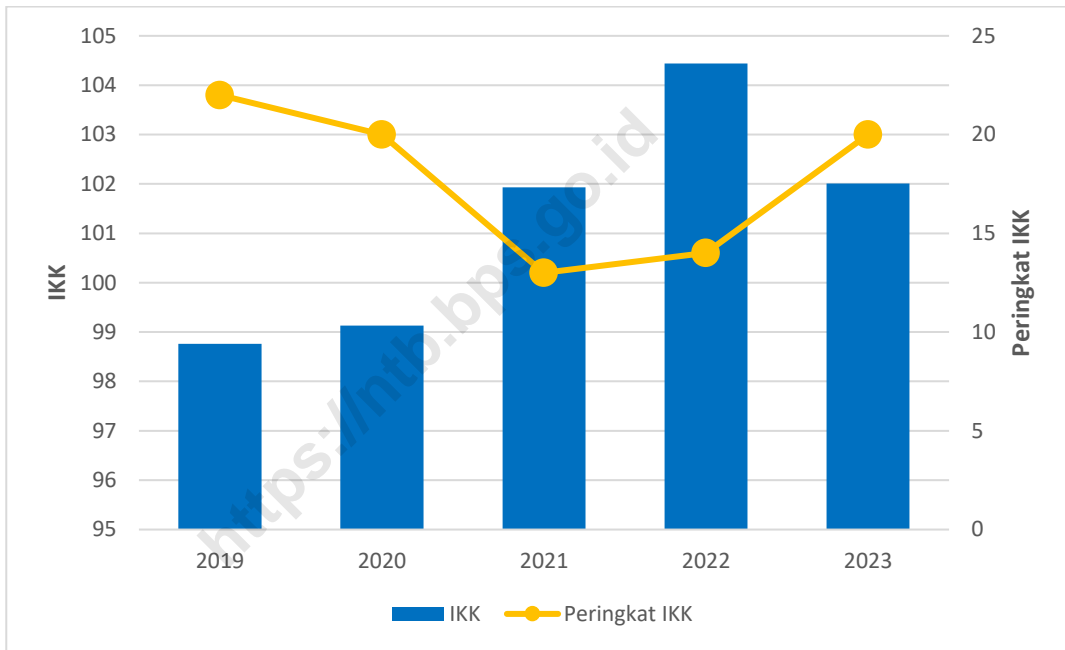
Gambar 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2023



Pada tahun 2023, nilai IKK Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 102,01. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga barang/jasa konstruksi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2,01 persen lebih mahal jika dibandingkan dengan Kota Makassar sebagai kota acuan.

Pada tahun 2023, di tingkat provinsi, IKK tertinggi tercatat di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 251,25 sedangkan IKK terendah tercatat di Provinsi Lampung sebesar 88,65. Jika dilihat menurut kewasannya, IKK Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati urutan kelima tertinggi dibandingkan sembilan provinsi yang ada di kawasan wilayah Jawa Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra).

Grafik 3. Peringkat Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Level Nasional, 2019–2023



Jika diurutkan dari nilai IKK tertinggi, pada tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat menduduki urutan ke-14 dari 34 Provinsi di Indonesia. Sedangkan tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat 19 dari 38 provinsi. Semakin kecil ranking IKK maka semakin besar nilai IKK suatu wilayah. Sejak tahun 2021 sampai 2023, nilai IKK Provinsi Nusa Tenggara Barat di atas 100, hal ini menandakan bahwa harga barang/jasa konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu tersebut lebih tinggi dibandingkan harga barang/jasa konstruksi di kota acuan (Kota Makassar).

4.4 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA

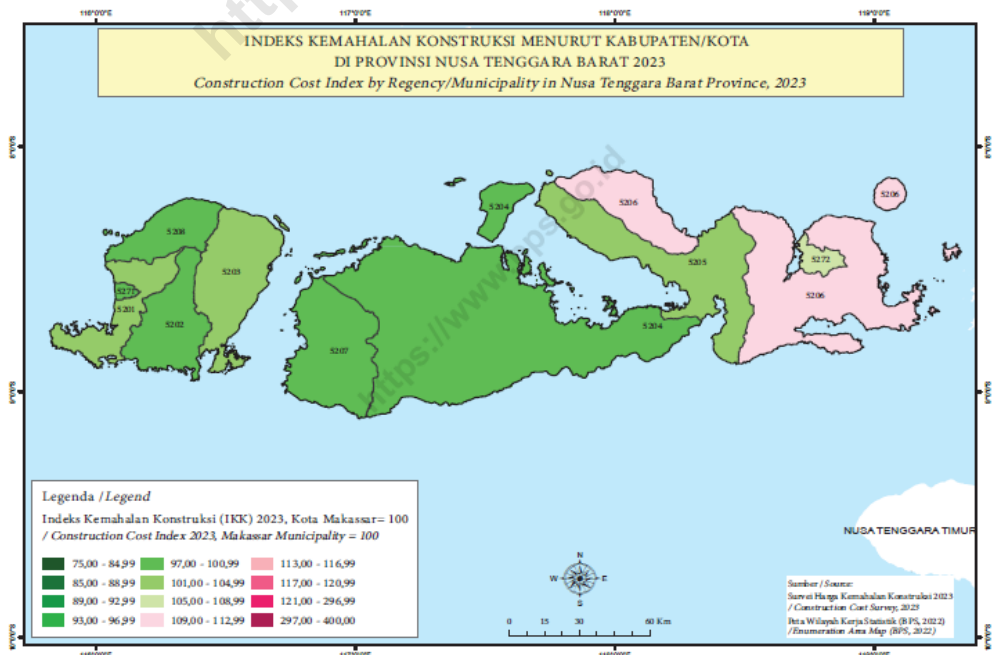
IKK dikumpulkan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kabupaten/kota yang tercatat memiliki nilai IKK paling tinggi yaitu Kabupaten Puncak dengan IKK sebesar 383,61 kemudian disusul Kabupaten Intan Jaya sebesar 376,04 serta Kabupaten Puncak Jaya sebesar 351,45. Ketiga kabupaten tersebut terletak di Provinsi Papua. Nilai IKK terendah tercatat di Kabupaten Belu (Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar 81,39, kemudian disusul Timor Tengah Utara (Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar 82,95 kemudian disusul Kabupaten Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar 83,71; serta Kabupaten Polewali Mandar (Provinsi Sulawesi Barat) sebesar 83,86.

Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5201	Lombok Barat	102,32
2	5202	Lombok Tengah	100,11
3	5203	Lombok Timur	101,71
4	5204	Sumbawa	98,34
5	5205	Dompu	104,70
6	5206	Bima	109,79
7	5207	Sumbawa Barat	97,19
8	5208	Lombok Utara	98,04
9	5271	Kota Mataram	100,59
10	5272	Kota Bima	108,12

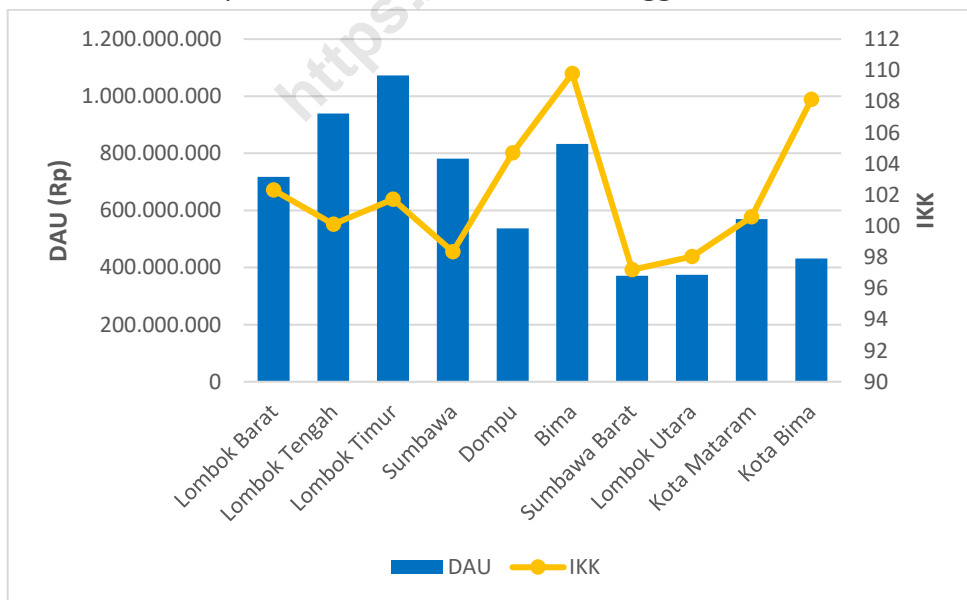
Dari sepuluh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kabupaten dengan IKK tertinggi pada tahun 2023 adalah Kabupaten Bima yaitu sebesar 109,79 kemudian disusul Kota Bima sebesar 108,12 dan Kabupaten Dompu sebesar 104,70. Sementara itu, IKK terendah tercatat di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 97,19. Nilai IKK Kabupaten Bima sebesar 109,79 menunjukkan tingkat kemahalan barang/jasa konstruksi di Kabupaten Bima 9,79 persen lebih mahal dari kota acuan (Kota Makassar). Dengan kata lain, jika untuk membangun sebuah gedung di Kota Makassar dibutuhkan biaya 100 milyar rupiah, maka gedung yang sama dibangun di Kabupaten Bima akan memerlukan biaya sebesar 109,79 miliar rupiah. Barang-barang pabrikan di Kabupaten Bima yang sebagian besar dipasok oleh dari luar provinsi diduga memberi sumbangan terhadap mahalanya harga barang/jasa konstruksi di Kabupaten Bima. Sementara itu, nilai IKK Kabupaten Sumbawa Barat yang paling rendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dikarenakan melimpahnya produksi kayu yang ada di kabupaten tersebut sehingga diduga memberi sumbangan terhadap kecilnya nilai IKK Kabupaten Sumbawa Barat.

Gambar 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023



IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU. Perolehan DAU masing–masing kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat relatif sejalan dengan nilai IKKnya meski untuk beberapa kabupaten, besaran DAU juga dipengaruhi oleh luasnya wilayah dan padatnya jumlah penduduk di kabupaten tersebut. Alokasi DAU tahun 2023 paling besar tercatat di Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 1.072,53 miliar rupiah. Tingginya DAU yang diterima oleh Kabupaten Lombok Timur dipengaruhi juga oleh status kabupaten tersebut yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak se–Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Bima dengan nilai IKK sebesar 109,79 atau peringkat pertama dari sepuluh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat tercatat memperoleh DAU sebesar 833,30 miliar rupiah. Sedangkan Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi memiliki nilai IKK sebesar 100,59 (urutan keenam) tercatat memperoleh DAU sebesar 569,74 miliar rupiah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram yang cukup besar sehingga memiliki kemandirian fiskal dan tidak bergantung pada DAU.

Grafik 4. Indeks Kemahalan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023



Catatan: DAU merupakan data Tahun 2022

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2023. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2023*. NTB: BPS Provinsi NTB.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kemenkeu. “*DBH, DAU, DID, Otsus, Dais DIY, Dana Desa*”. Pembaruan terakhir 22 November. <https://djk.kemenkeu.go.id/?portfolio=daftar-alokasi-tkdd-2022-prov-nusa-tenggara-barat>.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntp.bps.go.id>



LAMPIRAN



Halaman ini Sengaja Dikosongkan

<https://ntb.bps.go.id>

Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2019 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	98,68
2	1200	Sumatera Utara	102,79
3	1300	Sumatera Barat	93,72
4	1400	Riau	94,92
5	1500	Jambi	94,38
6	1600	Sumatera Selatan	94,50
7	1700	Bengkulu	94,74
8	1800	Lampung	88,84
9	1900	Kep. Bangka Belitung	101,27
10	2100	Kep. Riau	128,34
11	3100	Dki Jakarta	114,06
12	3200	Jawa Barat	103,03
13	3300	Jawa Tengah	99,93
14	3400	Di Yogyakarta	103,42
15	3500	Jawa Timur	103,68
16	3600	Banten	95,84
17	5100	Bali	119,10
18	5200	Nusa Tenggara Barat	98,76
19	5300	Nusa Tenggara Timur	99,03
20	6100	Kalimantan Barat	111,53
21	6200	Kalimantan Tengah	101,90
22	6300	Kalimantan Selatan	100,90
23	6400	Kalimantan Timur	114,37
24	6500	Kalimantan Utara	112,11
25	7100	Sulawesi Utara	108,32
26	7200	Sulawesi Tengah	91,98
27	7300	Sulawesi Selatan	97,34
28	7400	Sulawesi Tenggara	101,45
29	7500	Gorontalo	97,45
30	7600	Sulawesi Barat	92,27
31	8100	Maluku	123,02
32	8200	Maluku Utara	119,11
33	9100	Papua Barat	132,67
34	9400	Papua	218,59

Tabel 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2020 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	96,38
2	1200	Sumatera Utara	99,84
3	1300	Sumatera Barat	92,96
4	1400	Riau	95,72
5	1500	Jambi	90,35
6	1600	Sumatera Selatan	92,69
7	1700	Bengkulu	91,78
8	1800	Lampung	88,67
9	1900	Kep. Bangka Belitung	101,90
10	2100	Kep. Riau	121,50
11	3100	Dki Jakarta	116,84
12	3200	Jawa Barat	103,93
13	3300	Jawa Tengah	97,31
14	3400	Di Yogyakarta	102,29
15	3500	Jawa Timur	102,44
16	3600	Banten	97,05
17	5100	Bali	115,04
18	5200	Nusa Tenggara Barat	99,13
19	5300	Nusa Tenggara Timur	97,95
20	6100	Kalimantan Barat	110,92
21	6200	Kalimantan Tengah	99,55
22	6300	Kalimantan Selatan	100,32
23	6400	Kalimantan Timur	109,69
24	6500	Kalimantan Utara	109,90
25	7100	Sulawesi Utara	104,11
26	7200	Sulawesi Tengah	90,74
27	7300	Sulawesi Selatan	95,11
28	7400	Sulawesi Tenggara	101,09
29	7500	Gorontalo	94,12
30	7600	Sulawesi Barat	89,48
31	8100	Maluku	124,38
32	8200	Maluku Utara	120,52
33	9100	Papua Barat	129,66
34	9400	Papua	208,90

Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2021 (Kota Makassar = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	99,03
2	1200	Sumatera Utara	101,63
3	1300	Sumatera Barat	94,77
4	1400	Riau	94,85
5	1500	Jambi	92,76
6	1600	Sumatera Selatan	91,58
7	1700	Bengkulu	94,42
8	1800	Lampung	92,57
9	1900	Kep. Bangka Belitung	101,21
10	2100	Kep. Riau	116,80
11	3100	Dki Jakarta	121,42
12	3200	Jawa Barat	102,60
13	3300	Jawa Tengah	97,65
14	3400	Di Yogyakarta	100,31
15	3500	Jawa Timur	100,80
16	3600	Banten	97,64
17	5100	Bali	103,17
18	5200	Nusa Tenggara Barat	101,93
19	5300	Nusa Tenggara Timur	93,58
20	6100	Kalimantan Barat	111,45
21	6200	Kalimantan Tengah	101,47
22	6300	Kalimantan Selatan	99,25
23	6400	Kalimantan Timur	109,81
24	6500	Kalimantan Utara	106,00
25	7100	Sulawesi Utara	104,43
26	7200	Sulawesi Tengah	90,50
27	7300	Sulawesi Selatan	96,84
28	7400	Sulawesi Tenggara	99,38
29	7500	Gorontalo	95,07
30	7600	Sulawesi Barat	90,72
31	8100	Maluku	124,61
32	8200	Maluku Utara	112,31
33	9100	Papua Barat	130,59
34	9400	Papua	207,11

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2022 (Kota Makassar = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	100,59
2	1200	Sumatera Utara	103,40
3	1300	Sumatera Barat	97,66
4	1400	Riau	99,21
5	1500	Jambi	96,84
6	1600	Sumatera Selatan	92,04
7	1700	Bengkulu	95,65
8	1800	Lampung	90,46
9	1900	Bangka Belitung	102,78
10	2100	Kepulauan Riau	115,97
11	3100	DKI Jakarta	121,48
12	3200	Jawa Barat	105,97
13	3300	Jawa Tengah	100,63
14	3400	DI Yogyakarta	102,37
15	3500	Jawa Timur	100,02
16	3600	Banten	97,72
17	5100	Bali	104,74
18	5200	Nusa Tenggara Barat	104,44
19	5300	Nusa Tenggara Timur	93,69
20	6100	Kalimantan Barat	109,37
21	6200	Kalimantan Tengah	104,77
22	6300	Kalimantan Selatan	102,26
23	6400	Kalimantan Timur	115,65
24	6500	Kalimantan Utara	104,69
25	7100	Sulawesi Utara	104,74
26	7200	Sulawesi Tengah	92,50
27	7300	Sulawesi Selatan	95,22
28	7400	Sulawesi Tenggara	98,02
29	7500	Gorontalo	95,28
30	7600	Sulawesi Barat	87,44
31	8100	Maluku	107,97
32	8200	Maluku Utara	110,60
33	9100	Papua Barat	124,82
34	9400	Papua	192,57

Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2023 (Kota Makassar = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	97,38
2	1200	Sumatera Utara	98,81
3	1300	Sumatera Barat	94,15
4	1400	Riau	99,06
5	1500	Jambi	93,55
6	1600	Sumatera Selatan	91,39
7	1700	Bengkulu	93,27
8	1800	Lampung	88,65
9	1900	Bangka Belitung	103,94
10	2100	Kepulauan Riau	111,32
11	3100	DKI Jakarta	116,73
12	3200	Jawa Barat	104,08
13	3300	Jawa Tengah	100,19
14	3400	DI Yogyakarta	104,46
15	3500	Jawa Timur	98,47
16	3600	Banten	95,74
17	5100	Bali	103,40
18	5200	Nusa Tenggara Barat	102,01
19	5300	Nusa Tenggara Timur	92,44
20	6100	Kalimantan Barat	107,44
21	6200	Kalimantan Tengah	104,89
22	6300	Kalimantan Selatan	103,25
23	6400	Kalimantan Timur	115,58
24	6500	Kalimantan Utara	105,21
25	7100	Sulawesi Utara	101,62
26	7200	Sulawesi Tengah	91,96
27	7300	Sulawesi Selatan	95,88
28	7400	Sulawesi Tenggara	98,20
29	7500	Gorontalo	95,99
30	7600	Sulawesi Barat	91,94
31	8100	Maluku	108,12
32	8200	Maluku Utara	112,70
33	9100	Papua Barat	124,26
34	9200	Papua Barat Daya	121,87
35	9400	Papua	135,56
36	9500	Papua Selatan	138,42
37	9600	Papua Tengah	215,86
38	9700	Papua Pegunungan	251,25

Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	1100	Lombok Barat	100,91
2	1200	Lombok Tengah	98,04
3	1300	Lombok Timur	99,67
4	1400	Sumbawa	96,26
5	1500	Dompu	93,37
6	1600	Bima	102,05
7	1700	Sumbawa Barat	100,66
8	1800	Lombok Utara	94,04
9	1900	Kota Mataram	104,44
10	9700	Kota Bima	98,69

Tabel 7. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	1100	Lombok Barat	96,56
2	1200	Lombok Tengah	99,07
3	1300	Lombok Timur	99,21
4	1400	Sumbawa	94,49
5	1500	Dompu	93,52
6	1600	Bima	103,83
7	1700	Sumbawa Barat	100,44
8	1800	Lombok Utara	97,33
9	1900	Kota Mataram	106,56
10	9700	Kota Bima	100,99

<https://ntb.bps.go.id>

Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021 (Kota Makassar = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	1100	Lombok Barat	98,80
2	1200	Lombok Tengah	102,10
3	1300	Lombok Timur	105,61
4	1400	Sumbawa	96,64
5	1500	Dompu	101,44
6	1600	Bima	107,49
7	1700	Sumbawa Barat	100,01
8	1800	Lombok Utara	97,38
9	1900	Kota Mataram	103,75
10	9700	Kota Bima	106,74

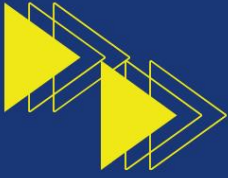
Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022 (Kota Makassar = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	5201	Lombok Barat	104,09
2	5202	Lombok Tengah	102,23
3	5203	Lombok Timur	106,43
4	5204	Sumbawa	99,67
5	5205	Dompu	107,93
6	5206	Bima	112,32
7	5207	Sumbawa Barat	96,47
8	5208	Lombok Utara	100,31
9	5271	Kota Mataram	104,09
10	5272	Kota Bima	112,03

<https://ntb.bps.go.id>

Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023 (Kota Makassar = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	5201	Lombok Barat	102,32
2	5202	Lombok Tengah	100,11
3	5203	Lombok Timur	101,71
4	5204	Sumbawa	98,34
5	5205	Dompu	104,70
6	5206	Bima	109,79
7	5207	Sumbawa Barat	97,19
8	5208	Lombok Utara	98,04
9	5271	Kota Mataram	100,59
10	5272	Kota Bima	108,12



ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 74 Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram

Telp. (0370) 621385, Fax. (0370) 623801

Homepage: <http://ntb.bps.go.id>

Email: bps5200@bps.go.id

